

ABSTRAK

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah sebuah metode pembayaran yang diinisiasikan oleh Kemenkeu RI yang diterapkan melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilatarbelakangi untuk mengefektifkan dana UP yang mengganggu / *Idle cash* serta mencoba mengurangi penggunaan uang tunai dalam rangka meminimalisasi potensi *fraud* yang muncul dari penggunaan uang tunai. Oleh karena itu, pengendalian atas pelaksanaan KKP ini merupakan hal penting untuk menciptakan pelaksanaan KKP yang transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari penyalahgunaan. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan melakukan penelitian / peninjauan atas pengendalian internal pelaksanaan KKP pada KPPN Surakarta serta identifikasi masalah yang mungkin muncul dari pelaksanaan KKP. Metode tinjauan yang dilakukan adalah metode studi Pustaka, observasi, dan wawancara dengan pegawai & kepala subbag umum KPPN Surakarta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan KKP pada KPPN Surakarta sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PMK.196/PMK.05/2018 dan peraturan lain yang terkait. Akan tetapi, terdapat beberapa risiko yang teridentifikasi dapat mengganggu dan berpengaruh pada pelaksanaan KKP diantaranya adalah layanan administrasi oleh bank penerbit KKP yang relatif lama, kurang terserapnya secara optimal UP KKP, masih adanya pembebanan *surcharge* oleh merchant, serta adanya risiko pemrosesan transaksi yang kurang tepat. Meskipun terdapat risiko-risiko yang teridentifikasi tersebut, pelaksanaan KKP di KPPN Surakarta sudah baik, namun tetap diperlukannya penelitian dan pengkajian yang lebih lanjut.

Kata kunci: Kartu Kredit Pemerintah, *Idle cash*, Pengendalian Internal, Risiko,

Abstract

The Government Credit Card (GCC) is an payment method initiated by Ministry of Finance Indonesia through Echelon 1 Unit Directorate General of the Treasury that are set for streamlining the Idle cash of UP as well as trying to reduce the use of cash in-order to reduce the fraud potential which emerged by the use of cash. Therefore, the control of GCC implementation are important to create GCC implementation that are transparent, responsible, and free from abuse. This study is performed for purpose of research or review about internal control of GCC implementation in KPPN Surakarta and identify problems that may emerge in the GCC implementation. The review method used are literature study, observation, and interviews with KPPN Surakarta's head of general subsection & employee. The result of observation shows that overall implementation of GCC is implemented well in line with PMK.196/PMK.05/2018 and other regulation related. However, there is some risk that identified could disturb and affect in the GCC implementation amongst them are administration service by the GCC publisher bank that are relatively long, lack of absorption of UP KKP optimally, there remains imposition of surcharge by merchant, and there is risk of less accurate in transaction processing. Although there is these identified risks, the GCC

implementation in KPPN Surakarta is fine but still needs further observation and assessment.

Keywords: *Government Credit Card, Idle Cash, Internal Control, Risk*